

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Reformasi politik di Indonesia merupakan sebuah kenyataan yang tidak dapat dinafikan, oleh karena itu, kalau tidak diantisipasi dengan baik akan membawa implikasi negatif terhadap tatanan kehidupan politik nasional. Sebuah Negara yang tidak mengantisipasi sebuah reformasi akan menghadapi masalah besar, karena akan berhadapan dengan kehendak yang sangat kuat dari rakyat dan tidak menutup kemungkinan akan menciptakan revolusi sosial. Hal yang terakhir ini merupakan sesuatu yang tidak kita kehendaki, karena akan menghancurkan tatanan kehidupan yang sudah kita bina bersama dalam sebuah ke-Indonesiaan. Oleh karena itu, reformasi politik yang dilakukan adalah dalam rangka memegang dan memelihara Negara Kesatuan.

Indonesia pada saat ini sedang mengalami perubahan pada hampir semua segi kehidupan, dimana reformasi telah mendorong secara kolektif terjadinya kemajuan-kemajuan dibidang ekonomi, sosial budaya dan politik, seiring dengan adanya perubahan tersebut telah menyebabkan kepentingan yang ada didalam masyarakat kian bervariasi dan meningkat, reformasi yang didengungkan banyak kalangan dan pakar politik berdampak positif terhadap pembangunan didaerah.

Undang-undang no 22 tahun 1999 tentang pemerintahan daerah adalah salah satu landasan yuridis bagi pengembangan otonomi daerah di Indonesia yang secara terbuka telah memberikan kesempatan yang nyata kepada daerah

11 - ... untuk / atau untuk berkembang

Pelaksanaan otonomi daerah sebagai wujud dari dianutnya asas desentralisasi, diharapkan akan dapat memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat karena kewenangan yang diterima oleh daerah melalui adanya otonomi daerah akan memberikan “kebebasan” kepada daerah untuk melakukan berbagai tindakan yang diharapkan akan sesuai dengan kondisi serta aspirasi masyarakat di wilayahnya. Anggapan tersebut disebabkan karena secara logis pemerintah daerah lebih dekat kepada masyarakat, sehingga akan lebih mengetahui apa yang akan menjadi tuntutan dan keinginan masyarakat, artinya aspirasi masyarakat akan lebih terakomodasi dan merupakan unsur pokok bagi berbagai kebijakan yang menyangkut aspek kehidupan masyarakat dengan otonomi daerah sebagai wujud desentralisasi.

Otonomi yang diberikan kepada daerah Kabupaten dan Kota dilaksanakan dengan memberikan kewenangan yang luas, nyata dan bertanggung jawab kepada pemerintah daerah secara proporsional. Artinya pelimpahan tanggung jawab akan diikuti oleh pengaturan, pembagian dan pemanfaatan dan sumberdaya nasional yang berkeadilan, serta perimbangan keuangan pusat dan daerah.¹

Keadaan ini memunculkan gagasan dan pemikiran untuk melakukan perubahan akan keberadaan pemerintahan desa, sehingga berbagai gagasan, keinginan dan pendapat saran atau tuntunan tentang reformasi banyak bermunculan dalam masyarakat bahkan setelah tumbangny rezim orde baru yang

¹ D.

menandai digulirkannya reformasi sekaligus ditetapkan oleh pemerintah menjadi kebijakan nasional.²

Otonomi desa sebenarnya bukanlah hal yang baru dinegeri ini, paling tidak pada masa Orde Baru, tepatnya 1 Desember 1979 ditetapkan sebuah Undang-Undang tentang pemerintahan desa yakni Undang-Undang no 5 tahun 1979, yang dianggap sebagai sebuah terobosan baru karena akan memberikan otonomi kepada Desa. Yang mungkin dapat dikatakan baru adalah konstruksi sosial politik yang terbangun pada era reformasi ini yang menaungi pemberlakuan kebijakan otonomi daerah yang juga memuat kebijakan tentang Otonomi Desa.

Otonomi yang diberikan kepada Pemerintah Kabupaten dan Kota, secara langsung sangat berpengaruh kepada Pemerintahan Desa dimana banyak sekali Desa yang melakukan pemekaran wilayah Desa. Sebagai contoh dengan adanya pemekaran wilayah Desa Sokong menjadi tiga desa yaitu Desa Sokong sebagai desa induk, Desa Medana dan Desa Teniga di Kecamatan Tanjung Kabupaten Lombok Barat sebagai desa yang mengusulkan pemekaran

Adapun alasan utama yang melatar belakangi adanya pemekaran wilayah Desa Sokong menjadi tiga desa yaitu Desa Sokong, Desa Medana dan Desa Teniga lebih dititik beratkan pada jumlah penduduk yang secara alami terus meningkat, adanya keinginan untuk mempercepat pembangunan, mempercepat pelayanan dan untuk menghindari terjadinya konflik yang disebabkan luasnya wilayah Desa yang secara langsung berdampak terhadap tidak terakomodirnya

² www.kemendagri.go.id, diakses 10 Desember 2009, hal. 1

aspirasi dari masyarakat yang ditandai dengan minimnya keterlibatan masyarakat dalam pembangunan desa.

Selain itu adanya tuntutan yang begitu besar dari masyarakat pada tingkat bawah menyebabkan terjadinya percepatan pemekaran dimana isu pemekaran ini merupakan isu lama yang muncul lagi ke permukaan setelah bergantinya era kepemimpinan Nuekalip sebagai Kepala Desa Sokong ke pejabat sementara yang dijabat oleh Ahmad M.Ali, BSc.

Menarik untuk diteliti mengenai Pemekaran Desa Sokong, dimana Isu mengenai pemekaran ini sudah ada sejak jaman kepemimpinan Nuekalip sebagai Kepala Desa Sokong yang telah menjabat dari tahun 1968 sampai tahun 2002. Adanya indikasi mengenai kuatnya faktor politis dan ekonomi yang terbangun pada masa kepemimpinannya menjadi penyebab tidak terealisasinya pemekaran.

Hal ini tentu saja banyak menimbulkan persepsi yang berbeda dikalangan masyarakat dan kaum elit politik yang ada. dan hal ini sekaligus membuka wacana bagi masyarakat akan keterlibatannya terhadap adanya pemekaran wilayah di desa

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, dapat diambil perumusan masalah sebagai berikut:

- a. Bagaimana Persepsi Masyarakat Desa Sokong Terhadap adanya Pemekaran?
- b. Bagaimana Persepsi Masyarakat Desa Medana Terhadap Adanya Pemekaran?
- c. Bagaimana Persepsi Masyarakat Tonja Terhadap adanya

C. Tujuan dan manfaat Penelitian

a. Tujuan Penelitian

- a. Secara Umum : Untuk menerangkan suatu fenomena sosial dengan menggunakan dua instrument yaitu logika dan observasi
- b. Secara Khusus : Untuk mengetahui persepsi masyarakat terhadap adanya pemekaran wilayah desa Sokong

b. Manfaat Penelitian

Dapat memberikan sumbangan ilmu pengetahuan serta menambah bacaan di bidang ilmu Pemerintahan. Hasil dari penelitian ini juga dapat dijadikan sebagai bahan referensi bagi pemerintah Kabupaten Lombok Barat untuk mengukur tingkat keberhasilan dari pemekaran yang dilakukan terhadap desa sokong yang telah dimekarkan menjadi 3 desa

D. Kerangka Dasar Teori

Kerangka dasar merupakan bagian yang terdiri dari uraian yang menjelaskan variabel-variabel dan hubungan-hubungan antar variabel berdasarkan konsep atau definisi tertentu. Pada bagian ini penulis akan mengemukakan definisi teori-teori yang menjadi acuan bagi penelitian yang akan dilakukan.

Menurut Sofian Effendi, teori adalah merupakan unsur penelitian yang paling besar perannya dalam penelitian. Karena dengan unsur inilah peneliti mencoba menerangkan fenomena dan fenomena alami yang menjadi pusat perhatiannya. Lebih lanjut lagi F.N.Kerlinger dalam bukunya "Foundation of Behavioral Research" yang dikutip oleh Sofian Effendi mengemukakan bahwa teori merupakan serangkaian asumsi, konsep, konstruk, definisi dan proposisi untuk menerangkan sesuatu fenomena sosial secara sistematis dengan merumuskan hubungan antar konsep.³

Menurut definisi teori ini mengandung tiga hal, *pertama*, teori adalah serangkaian proposisi antar konsep-konsep yang saling berhubungan. *Kedua*, teori digunakan untuk menerangkan secara sistematis suatu fenomena sosial dengan cara menentukan hubungan antar konsep. *Ketiga*, teori menerangkan fenomena tertentu dengan cara menentukan konsep mana yang berhubungan dengan konsep lainnya dan bagaimana pula bentuk hubungannya.

Dengan demikian, maka teori merupakan dasar dalam mencoba mencari jalan untuk memecahkan suatu permasalahan yang terjadi dengan upaya untuk memahami teori-teori yang berkaitan dengan apa yang akan diteliti, ini merupakan

³ Sofian Effendi dan Mersi Singarimbun, *Metode Penelitian Sempit*, IP3ES, Jakarta 1989 hal 37

suatu keharusan dimana dengan landasan teori yang benar tentunya akan dapat sangat membantu dalam menemukan jalan keluar untuk memecahkan permasalahan dengan hasil yang dapat diketahui kebenarannya.

Berdasarkan konsep uraian diatas serta melihat latar belakang dan permasalahan yang terkait maka dapat diuraikan bahwa kerangka dasar teori yang akan dipergunakan sebagai acuan di dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Pemekaran Wilayah desa

a. Desa

Desa adalah suatu wilayah yang ditempati oleh sejumlah penduduk sebagai kesatuan masyarakat termasuk didalamnya masyarakat hukum yang mempunyai organisasi pemerintahan daerah langsung dibawah Camat dan berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri dalam Ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.⁴

Unsur-unsur yang terdapat pada suatu Desa sebagai persyaratan agar bisa disebut sebuah Desa adalah:

1. Wilayah

Wilayah dapat meliputi tiga hal yaitu daratan/tanah, air/perairan seperti laut,sungai dan Udara. Wilayah desa harus jelas batas-batasnya dan harus disepakati oleh desa lain yang berbatasan. Batas bias berupa sungai , pegunungan , jalan atau tugu yang sengaja dibangun sebagai batas.

⁴ D. M. S. (1990). *Geografi: Aspek Sistem Administrasi pemerintahan di daerah bumi elman indo*

2. Penduduk

Penduduk desa adalah setiap orang yang bertempat kedudukan di dalam wilayah desa yang bersangkutan selama beberapa waktu tertentu dan tercatat.

3. Pemerintah Desa

Pemerintah Desa adalah organisasi pemerintah terendah dari pemerintah Republik Indonesia yang berdasarkan azas dekonsentrasi di tempatkan dibawah pemerintahan camat.

Pemerintah desa menurut Undang-undang No 22 tahun 1999 terdiri dari :

1. Pemerintah Desa terdiri atas Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dan Perangkat Desa
2. Kepala Desa dipilih secara langsung oleh penduduk Desa dari calon yang memenuhi syarat.
3. Calon Kepala Desa yang terpilih dengan mendapatkan dukungan suara terbanyak, sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan oleh Badan Perwakilan Desa dan disahkan oleh Bupati.

Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

1. Pemerintah Desa.

- a. Desa atau yang disebut nama lain, selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan

untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat

setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam system Pemerintahan Nasional dan berada di daerah Kabupaten

- b. Pemerintah Desa adalah kegiatan Pemerintah yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dan Badan Perwakilan Desa
- c. Pemerintah Desa adalah kepala Desa dan Perangkat Desa
- d. Perangkat Desa adalah pembantu Kepala Desa dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya
- e. Perangkat Desa sebagai pembantu Kepala Desa dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya dapat terdiri atas unsure staf, unsure pelaksana dan unsure wilayah:
 - a. Unsur Staf yaitu unsur pelayanan seperti sekretaris desa atau tata usaha
 - b. Unsur pelaksana yaitu unsur pelaksana teknis lapangan seperti pekasih dan langlang.
 - c. Unsur Wilayah yaitu unsur pembantu Kepala Desa diwilayah bagian Desa seperti Kepala Dusun
- f. Perangkat Desa dapat dipilih dan atau diangkat tanpa pemilihan sesuai kondisi sosial budaya masyarakat setempat dari penduduk desa yang memenuhi persyaratan
- g. Perangkat Desa ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa setelah mendapat persetujuan Badan Perwakilan Desa

- h. Kewenangan Desa mencakup:
 - a. Kewenangan yang sudah ada berdasarkan hak asal usul desa
 - b. Kewenangan yang oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku yang belum dilaksanakan oleh Daerah dan Pemerintah
- i. Dusun adalah bagian wilayah dalam Desa yang merupakan lingkungan kerja pelaksanaan pemerintah Desa

2. Sekretaris Desa

Sekretaris Desa adalah unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam menjalankan hak, wewenang dan kewajiban Pimpinan Pemerintahan Desa

- a. Sekretaris Desa mempunyai tugas membantu Kepala Desa dibidang pembinaan administrasi dan memberikan pelayanan teknis administrative kepada seluruh Perangkat Pemerintah Desa.
- b. Untuk menjalankan tugas tersebut sekretaris desa mempunyai tugas
 - Melakukan koordinasi terhadap kegiatan yang dilakukan oleh Perangkat Desa
 - Mengumpulkan bahan, mengevaluasi data dan perumusan program serta petunjuk untuk keperluan pembinaan penyelenggaraanh tugas umum Pemerintahan Desa, pembangunan dan pembinaan Kemasyarakatan

h. Kewenangan Desa mencakup:

- a. Kewenangan yang sudah ada berdasarkan hak asal usul desa
- b. Kewenangan yang oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku yang belum dilaksanakan oleh Daerah dan Pemerintah
- i. Dusun adalah bagian wilayah dalam Desa yang merupakan lingkungan kerja pelaksanaan pemerintah Desa

2. Sekretaris Desa

Sekretaris Desa adalah unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam menjalankan hak, wewenang dan kewajiban Pimpinan Pemerintahan Desa

- a. Sekretaris Desa mempunyai tugas membantu Kepala Desa dibidang pembinaan administrasi dan memberikan pelayanan teknis administrative kepada seluruh Perangkat Pemerintah Desa.
- b. Untuk menjalankan tugas tersebut sekretaris desa mempunyai tugas
 - Melakukan koordinasi terhadap kegiatan yang dilakukan oleh Perangkat Desa
 - Mengumpulkan bahan, mengevaluasi data dan perumusan program serta petunjuk untuk keperluan pembinaan penyelenggaraanh tugas umum Pemerintahan Desa, pembangunan dan pembinaan Kemasyarakatan

- Melakukan pelayanan kepada masyarakat dibidang Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan
- Melakukan urusan keuangan, perlengkapan, rumah tangga, surat menyurat dan kearsipan
- Menyusun Program Kerja tahunan Desa
- Menyusun laporan akhir tahun penyelenggaraan Pemerintahan Desa

3. Urusan-Urusan

Urusan Pemerintahan Desa

a. Urusan ekonomi dan pembangunan

- Mengumpulkan, mengolah dan mengevaluasi data dibidang Perekonomian dan Pembangunan
- Melakukan bimbingan dibidang perkoperasian, pengusaha ekonomi lemah dan kegiatan perekonomian lainnya
- Membantu koordinasi pelaksanaan pembangunan serta menjaga dan memelihara prasarana dan sarana fisik dilingkungan desa

b. Urusan administrasi dan Umum

- Melakukan administrasi kepegawaian
- Melaksanakan urusan perlengkapan dan inventaris desa
- Melaksanakan urusan rumah tangga sekretariat desa

c. **Urusan ketentraman dan ketertiban**

- Melakukan pembinaan ketentraman dan ketertiban Masyarakat
- Membantu melaksanakan pengawasan terhadap penyaluran bantuan kepada Masyarakat serta melakukan kegiatan pengawasan terhadap akibat bencana alam dan bencana lainnya

d. **Urusan Kemasyarakatan**

- Melakukan bimbingan dibidang keagamaa, kesehatan, keluarga berencana dan pendidikan Masyarakat
- Membantu pelaksanaan bimbingan kegiatan Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK), Karang Taruna, Pramuka dan organisasi kemasyarakatan lainnya
- Membina kegiatan pengumpulan zakat, infaq dan shadaqah

e. **Urusan Keuangan**

- Menerima, menyimpan dan mengeluarkan uang desa
- Mengurus administrasi dan membayar tunjangan aparat
- Mengurus pembukuan uang desa.

2. Pemekaran Wilayah

Tujuan penyelenggaraan otonomi daerah harus sesuai dengan kepentingan politik jangka panjang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan secara obyektif tidak membebani rakyat tapi justru meningkatkan kesejahteraan dan

kemakmuran rakyat. Dalam Undang-Undang no 22 tahun 1999 tentang pemerintahan daerah pasal 93 mengenai Pembentukan, penghapusan dan atau penggabungan desa berbunyi:

1. Desa dapat dibentuk, dihapus, dan atau digabung dengan memperhatikan asal-usulnya atas prakarsa masyarakat dengan persetujuan pemerintah kabupaten dan DPRD
2. Pembentukan, penghapusan, dan atau penggabungan desa, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan peraturan Daerah.

Sedangkan pemekaran suatu wilayah atau daerah adalah karena keinginan dari masyarakat untuk mengatur dan mengurus daerahnya sendiri sehingga dapat memacu pertumbuhan dan perkembangan daerah serta meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya.

Maksud dan tujuan pemekaran Wilayah antara lain:⁵

1. Meningkatkan efektifitas penyelenggaraan pemerintahan pembangunan dan penyelenggaraan kemasyarakatan.
2. Meningkatkan kualitas dan kuantitas pembangunan serta mempercepat semua pembangunan daerah melalui pengelolaan potensi yang ada.
3. Meningkatkan pengendalian dan pengawasan sumber daya alam sebagai sumber kehidupan bagi masyarakat dengan pengelolaan secara optimal.
4. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia dengan laju pertumbuhan pembangunan yang semakin meningkat.
5. Meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat.

⁵ D. S. K. (1999). *Undang-Undang Daerah di Indonesia*. Sinar Grafika Jakarta, 2001, hal. 50.

2. Persepsi Masyarakat

a. Persepsi

Persepsi merupakan salah satu faktor yang terjadi dalam diri seseorang yang akan mempengaruhi dirinya dalam mengambil suatu keputusan atau melakukan tindakan atau perilaku tertentu. Manusia dalam hal ini sebagai perseptor dalam suatu proses persepsi secara runtut melihat objek, sasaran, kejadian, atau hubungan keduanya, mendengar, menyetujui, merasakan, memahami objek atau sasaran tertentu setelah itu perseptor baru mengorganisir penafsiran dan akhirnya dapat menilai sesuatu berdasarkan atas pengalaman yang dialaminya.

Menurut Udai Pareek, batasan persepsi yaitu ⁶

“Persepsi adalah suatu proses menerima, mengorganisasikan, mengartikan, menguji dan memberi reaksi kepada rangsangan panca indra”

Sedangkan Menurut Miftah Thoha persepsi adalah:⁷

“Persepsi pada hakekatnya adalah proses kognitif yang dialami setiap orang dalam memahami informasi tentang lingkungannya, baik melalui penglihatan, pendengaran, penghayatan, perasaan dan penciuman. Kunci untuk memahami persepsi itu merupakan suatu penafsiran yang unik terhadap situasi bukannya suatu pencatatan yang benar terhadap situasinya.”

Dari berbagai pendapat seperti yang telah dikemukakan diatas, dapat disimpulkan bahwa persepsi adalah merupakan proses mental individu didalam

⁶ Udai Pareek, *Perilaku organisasi* pustaka Dinamon Prasindo, Jakarta 1984, hal 13

⁷ Miftah Thoha, *Perilaku Organisasi dan Manajemen*, CV Rajawali Jakarta 1982 hal

memberikan pandangannya terhadap sesuatu hal atau obyek sehingga menghasilkan sikap tertentu dalam diri individu yang bersangkutan, karena sikap individu akan memberikan arti tertentu pada lingkungan tertentu dan individu yang berbeda. Dengan kata lain persepsi merupakan bentuk pola pikir seseorang dalam memahami suatu fenomena/obyek tertentu.

Syarat-syarat atau hal-hal yang harus tercakup dalam proses persepsi adalah:

1. Obyek atau sasaran yang diamati
2. Alat indera yang cukup baik untuk menangkap indera
3. Perhatian yang dalam hal ini merupakan persiapan dalam mengadakan pengamatan.

Yang dimaksud dengan persiapan adalah berasal dari pengalaman dan pengetahuan tentang obyek sasaran. Dengan adanya pengetahuan dan pengalaman, maka akan menjadikan seseorang (perseptor) mengadakan perhatian yang pada gilirannya menimbulkan pengamatan.

Oleh Oskamp (1972) dikemukakan 4 karakteristik penting dari faktor-faktor pribadi yang mempengaruhi persepsi kita, yaitu:

3. Faktor ciri khas dari objek stimulus yang terdiri dari nilai, arti, emosional, familiaritas dan intensitas.
4. Faktor Pribadi. Termasuk ciri pribadi seperti taraf kecerdasan, minat dan lain-lain
5. Faktor perbedaan latar belakang kultur: Menurut Tajfel (1969) ada 3

variabel yang termasuk dalam hal ini:

Mayor Polak mendefinisikan masyarakat sebagai

“Wadah segenap antar hubungan sosial yang terdiri dari banyak sekali kolektivitas serta kelompok dan tiap-tiap kelompok lagi atas kelompok-kelompok yang lebih kecil (subkelompok) semuanya itu tersusun hirarkhis (dari atas ke bawah) atau berkesinambungan, sejajar dan setaraf ataupun saling tembus menembus”.¹¹

Sedangkan Kuntjoroningrat mendefinisikan masyarakat sebagai

“Masyarakat adalah kesatuan hidup dari mahluk-mahluk manusia yang terkait oleh suatu system tertentu”.¹²

Adapun syarat-syarat timbulnya masyarakat.¹³

1. Harus perkumpulan Manusia yang lebih dari Satu
2. Telah bertempat tinggal disuatu daerah tertentu dalam waktu yang lama
3. Adanya aturan-aturan yang mengatur untuk kepentingan bersama.

Jadi dapat disimpulkan Persepsi Masyarakat adalah merupakan proses mental individu didalam memberikan pandangannya terhadap sesuatu hal atau obyek sehingga menghasilkan sikap tertentu dalam diri individu yang bersangkutan.

¹⁰ Anis Da Rato, *Ringkasan Sosiologi Antropologi*, PT Mitra Gama Widya, Yogyakarta 1987, hal 74.

¹¹ Anis Da Rato, *ibid* hal 74.

¹² Kuntjoroningrat, *Masyarakat Indonesia Masa Kini*, Yayasan Bada Penerbit Fak.ekonomi UI, Jakarta, 1964. hal 348

¹³ Anis Da Rato, *ibid*, hal 74.

E. Definisi Konsepsional

Masri Singarimbun mendefinisikan Definisi konsepsional sebagai berikut:

“Konsep adalah abstraksi mengenai suatu fenomena yang dirumuskan atas dasar generalisasi dari sejumlah karakteristik kejadian, keadaan kelompok atau individu.¹⁴ Selanjutnya definisi konsep dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Persepsi masyarakat

Merupakan pandangan masyarakat terhadap obyek atau kejadian yang ada di sekelilingnya, pandangan yang mana dipengaruhi oleh lingkungannya, pengalaman, kepentingan dan pengetahuannya. Jadi setiap individu mempunyai pandangan yang berbeda dalam mempersepsikan suatu kejadian atau obyek yang sama pada waktu yang sama pula.

2. Pemekaran wilayah

Pemekaran suatu wilayah dilakukan dalam upaya untuk mengatur dan mengurus daerahnya sendiri dalam rangka mengembangkan, meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya.

3. Desa

Desa adalah suatu wilayah ditempati oleh sejumlah penduduk sebagai kesatuan masyarakat termasuk didalamnya masyarakat hukum yang mempunyai organisasi pemerintahan serendah-rendahnya langsung dibawah camat dan berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri dalam ikatan Negara kesatuan.

¹⁴ Singarimbun, Masri. (1983). *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Alfabeta.

F. Definisi Operasional

Menurut Masri Singarimbun definisi operasional adalah sebagai berikut:

“Definisi operasional adalah unsur penelitian yang memberitahukan bagaimana cara mengukur suatu variabel, dengan kata lain definisi operasional adalah unsur penelitian yang memberitahukan bagaimana caranya mengukur suatu variabel/suatu informasi ilmiah yang amat membantu penelitian lain yang ingin menggunakan variabel yang sama”.¹⁵

Persepsi masyarakat terhadap pemekaran wilayah dapat dilihat dari:

1. Pengetahuan Masyarakat terhadap dampak yang akan ditimbulkan dari adanya pemekaran.
2. Pengetahuan Masyarakat terhadap Pemekaran wilayah dalam rangka meningkatkan efektivitas Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan.
3. Kemampuan Masyarakat untuk mengontrol Pembangunan Desa.
4. Keterlibatan Masyarakat dalam Pembangunan Desa.
5. Harapan Masyarakat terhadap adanya Pemekaran.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah Deskriptif kualitatif. Menurut winarno Surachmad:

“Penelitian deskriptif merupakan istilah yang umum yang mencakup beberapa teknik deskriptif diantaranya penelitian yang menuturkan, mengklasifikasikan, menggambarkan dan menganalisa data serta untuk menyelesaikan masalah-masalah yang ada pada saat sekarang ini dengan menggunakan teknik interview, kuesioner, observasi dan dokumentasi¹⁶

Masri singarimbun menyatakan,¹⁷ bahwa penelitian deskriptif mempunyai dua tujuan, yaitu:

1. Untuk mengetahui perkembangan sarana fisik tertentu atau frekuensi terjadinya suatu aspek fenomena social tertentu.
2. Untuk mendeskripsikan secara terperinci fenomena sosial tertentu umpamanya interaksi social, system kekerabatan dan lain-lainnya.

2. Jenis data

Ada dua macam data yang dibutuhkan dalam peneliian ini, yakni data primer dan data sekunder. Data primer yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah data-data yang berkaitan dengan pemekaran wilayah desa Sokong yang diperoleh langsung dari masyarakat yang menerima pelayanan yang berupa jawaban terhadap pertanyaan dalam kuesioner.. Sedangkan data sekunder adalah pendukung data primer misalnya data-data dokumentasi dari daerah penelitian.

¹⁶ winarno Surachmad, *dasar dan teknik research*, tarsito, bandung, 1987, hal139

¹⁷ Masri Singarimbun dan Sofyan Effendi: *Metode penelitian Survei*, LP2ES Jakarta, 1983 hal 4

3. Teknik pengumpulan data

Menurut Natzir teknik pengumpulan data didefinisikan sebagai prosedur yang sistematis dan standar untuk memperoleh data yang diperlukan¹⁸

Adapun teknik yang dipakai untuk mengumpulkan data dalam penelitian ini adalah:

1. Kuesioner

Kuesioner dipakai sebagai teknik utama dalam pengumpulan data pada penelitian ini, yaitu dengan menyebarkan suatu daftar pertanyaan yang sebelumnya telah disusun kepada masyarakat, tokoh masyarakat maupun kepada elit politik local yang ada di Desa Sokong. Masri Singarimbun dan Sofyan Effendi mendefinisikan Kuesioner sebagai: "Metode pengumpulan data dari responden yang dilakukan melalui daftar pertanyaan dengan maksud memperoleh informasi yang relevan. Daftar pertanyaan yang tertutup yakni jawabannya ditentukan lebih dahulu dan responden tidak diberi hak jawab".¹⁹

2. Wawancara

Masri Singarimbun dan Sofian Effendi menyatakan bahwa "Wawancara adalah sebuah bagian penting dari setiap observasi. Tanpa Wawancara peneliti akan kehilangan informasi yang hanya dapat diperoleh dengan bertanya secara langsung kepada responden"²⁰

Berkaitan dengan pengertian tentang wawancara, Sutrisno Hadi mengatakan "Interview atau wawancara sebagai metode pengumpulan data

¹⁸ Moh. Natzir, *Metode Penelitian*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1983, hal 105.

¹⁹ Masri Singarimbun dan Sofyan Effendi, *Metode Penelitian*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1983, hal 117.

dengan jalan tanya jawab sepihak yang dikerjakan dengan sistematis dan berlandaskan kepada tujuan penyelidikan.

Adapun teknik wawancara ini digunakan untuk untuk mengetahui persepsi masyarakat, penulis akan mendapatkan informasi dengan cara bertanya langsung kepada responden yang terdiri dari: tokoh masyarakat yang bias berupa elit politik local dan masyarakat di tiga desa pemekaran.

3. Observasi

Observasi sangat penting dalam melakukan penelitian sebab dengan menggunakan teknik observasi ini dapat diketahui secara langsung daerah yang diteliti

Sutrisno Hadi menyatakan: “Sebagai metode ilmiah, observasi bias diartikan sebagai pengamatan-pengamatan yang pencatatannya dengan sistematis atas fenomena-fenomena yang yang diselidiki. Penelitian observasi secara luas sebenarnya tidak hanya terbatas pada pengamatan yang dilakukan baik secara langsung maupun tidak langsung”²¹

Data yang diperoleh melalui observasi dapat digunakan untuk melengkapi data-data yang lain dan dapat pula digunakan untuk landasan penyusunan pertanyaan-pertanyaan dalam kuesioner. Dari hasil observasi dapat diketahui bahwa di tiga desa tersebut dapat diketahui fasilitas-fasilitas yang tersedia setelah dilakukan pemekaran.

²¹ Sutrisno Hadi, *Metode Penelitian Ilmiah*, (Yogyakarta: Tiara Wacana, 1997), 100

4. Dokumentasi

Data-data yang mendukung penelitian dapat diperoleh dengan memakai dokumen-dokumen sebagai sumber data yang diperlukan. Dokumen-dokumen itu dapat berupa catatan-catatan, buku-buku, laporan-laporan dan lain sebagainya yang ada kaitannya dengan masalah yang diteliti. Dokumen-dokumen itu dapat diperoleh dari Kantor Desa, Kecamatan, Kabupaten dan instansi lainnya yang terkait.

Sulistyo Basuki menyatakan Dokumentasi merupakan kegiatan yang bersangkutan dengan dokumen tertentu. Dokumen adalah wahana seperti buku-buku, majalah, pamphlet, foto-foto, rekaman suara sebagai rekaman dari komunikasi langsung²².

4. Teknik Pengambilan Sampel

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan Purposive sampling, Sampling Purposive dilakukan dengan mengambil orang-orang yang terpilih betul oleh peneliti menurut ciri-ciri spesifik yang dimiliki oleh sampel itu. Misalnya orang yang mempunyai tingkat pendidikan tertentu, jabatan tertentu, mempunyai usia tertentu yang pernah aktif dalam kegiatan masyarakat tertentu.

a. Populasi

Menurut *Arikunto*, populasi adalah keseluruhan subjek penelitian. Apabila seseorang ingin meneliti semua elemen yang ada di dalam wilayah, maka penelitiannya merupakan penelitian populasi.²³

Populasi bukan hanya orang, tapi juga benda-benda alam yang lain.

²² Sulistyo basuki, *Teknik dan Jasa dokumentasi*, Gramedia, Jakarta, 1992, hal 2.

²³

Populasi juga bukan sekedar jumlah yang ada pada objek atau subjek yang di pelajari tetapi meliputi seluruh karakteristik atau sifat yang dimiliki oleh objek atau subjek itu.

b. Sampel

Sampel adalah bagian dari populasi yang diambil sebagai perwakilan untuk penelitian di mana sampel itu dianggap telah mewakili populasi. Menurut *sugiono*, sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut.²⁴

Dalam menentukan berapa besar jumlah sampel yang diperlukan dalam sebuah penelitian tidak ada aturan yang tegas tentang jumlah sampel yang dipersyaratkan untuk suatu penelitian dari populasi yang tersedia. “Agar dapat menghemat waktu, biaya dan tenaga, maka seseorang peneliti harus dapat memperkirakan besarnya sample yang diambil sehingga presisinya dianggap cukup untuk menjamin tingkat kebenaran hasil penelitian”.²⁵

Dalam penelitian ini, Peneliti akan memakai 90 sampel yang terpilih berdasarkan tingkat pendidikan, jabatan dan pengaruh yang dimiliki di masyarakat yang mewakili populasi yang ada.

Adapun penjabaran dari jumlah sampel yang digunakan sebagai berikut:

1. 30 sampel diambil dari tokoh masyarakat yang ada di tiga Desa
2. 60 sampel diambil dari masyarakat masing-masing diambil sebanyak 20 sampel dari masing-masing Desa

²⁴ Sugiyono, *metode penelitian administrasi*, CV.Alfabeta, Bandung, 2005, hal :91

5. Teknik analisa data

Dalam menganalisa data dalam penelitian ini penyusun menggunakan analisa kualitatif dan kuantitatif. Pada penelitian kualitatif tidak selalu mencari sebab akibat, tetapi lebih berupaya memahami situasi tertentu dan mencoba mendalami gejala dengan menginterpretasikan masalahnya atau menyimpulkan kombinasi dari berbagai arti permasalahannya sebagaimana disajikan oleh situasinya. Menurut Noeng Muhadjir dalam bukunya metode penelitian kualitatif menyatakan bahwa: "Analisa data merupakan upaya mencari dan menata secara sistematis catatan hasil observasi. Wawancara dan lainnya untuk meningkatkan pemahaman peneliti tentang kasus yang diteliti dan menyajikan sebagai temuan bagi orang lain".²⁶

Sedangkan secara kuantitatif, merupakan metode yang berpangkat pada peristiwa yang dapat diukur secara kuantitatif atau yang dapat dinyatakan dengan angka-angka, indeks, rumus dan sebagainya.²⁷

Rumus untuk mencari Indeks

$$I = \frac{1xf_1 + 2xf_2 + 3xf_3}{N}$$

Keterangan:

I = Indeks

F = Nilai sample

N = Jumlah Sample

²⁶ Noeng Muhadjir, *Metode Penelitian Kualitatif*, 1989, hal 171

Dari pertanyaan kuesioner masing-masing jawaban A sampai C mempunyai nilai 1-3 dengan rinci A nilainya 3, B nilainya 2, C nilainya 1

Interval indeks :

$$I = \frac{R}{K}$$

Keterangan : I = besar interval

R = jarak nilai tertinggi – nilai terendah

K = jumlah kategori

$$= \frac{3 - 1}{3}$$

$$= 0,67$$

$$= 0,67$$

Jadi besarnya interval adalah 0.66

Keterangan kriteria penilaian :

1 - 1,66 = Tidak setuju

1,67 – 2,33 = Setuju

2,34 – 3,00 = Sangat setuju

Selanjutnya untuk menentukan persentase dari jumlah jawaban yang telah diberikan oleh responden digunakan rumus sebagai berikut:

$$P = \frac{F}{n} \times 100\%$$

Keterangan : P = persentase jawaban

F = frekuensi/nilai jawaban

n = jumlah responden

6. Lokasi Penelitian

Dalam melaksanakan penelitian ini, Penyusun akan mengambil lokasi Penelitian di wilayah desa Sokong yang telah dimekarkan menjadi 3 desa yaitu Desa Sokong, Desa Medana dan Desa Teniga dimana pemekaran tersebut terjadi pada tahun 2003 dan penulis merasa tertarik untuk melakukan Penelitian di Wilayah tersebut yang lebih dikarenakan keingin tahuan peneliti mengenai pandangan masyarakat tiga desa tersebut terhadap pemekaran